



ANALISIS KURIKULUM DALAM MODEL PEMBELAJARAN SEJARAH ISLAM BERBASIS KEBHINNEKAAN (PSI-BK) SEBAGAI DAYA TANGKAL RADIKALISME DI PERGURUAN TNGGI

¹Heri Effendi ²Siti Aisyah ³Muspardi ⁴Muhammad Sahnani ⁵H. Muslim

^{1,2} Fakultas Pendidikan IPS Dan Bahasa, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Program Studi

³Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Adzka, ⁴Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Bung Hatta, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,

⁵Universitas Bung Hatta

¹effendiheri550@gmail.com, ²Sa4167505@gmail.com,

³muspardikoga@gmail.com, ⁴msahnani772@gmail.com, ⁵muslimtawakal@ymail.com

ABSTRAK

Kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan. Kurikulum merupakan bidang yang paling langsung berpengaruh terhadap hasil pendidikan. Keberhasilan transformasi ini sangat ditentukan oleh beberapa aspek diantaranya, perumusan capaian pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, materi, sumber dan media, sampai dengan penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang konsep Pembelajaran Sejarah Islam Berbasis Kebhinnekaan (PSI-BK) sebagai daya tangkal radikalisme di Perguruan Tinggi. Subjek dan lokasi penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah di Institut pendidikan Tapanuli Selatan dan mahasiswa Prodi PPKn dan PGSD Universitas Bung Hatta Padang. Sesuai target penelitian pada tahun pertama (tahun 2019), dari hasil analisis kurikulum dalam pembelajaran sejarah Islam, maka diperoleh karakteristik model pembelajaran sejarah Islam berbasis kebhinnekaan sebagai daya tangkal radikalisme di perguruan tinggi sebagai berikut: (1) materi integratif, (2) metode interaktif (3) media inovatif dan (4) evaluasi komprehensif.

Kata Kunci: Kurikulum, Model PSI-BK, Radikalisme, Perguruan Tinggi

ABSTRACT

The curriculum is the core of the education process. The curriculum is the field that most directly influences educational outcomes. The success of this transformation was determined by several aspects including the formulation of learning achievements, learning implementation, materials, sources and media, to the assessment of learning processes and outcomes. The subjects and locations of this study were students of History Education Study Program at the South Tapanuli Institute of Education and students of PPKn and PGSD Study Program at Bung Hatta University in Padang. According to the research target in the first year (2019), from the results of curriculum analysis in learning Islamic history, the characteristics of Islamic history learning model based on diversity as a deterrent power of radicalism in higher education are as follows: (1) integrative material, (2) interactive methods (3) innovative media and (4) comprehensive evaluation. The results of the need assessment revealed that respondents agreed the need for the development of a diversity-based Islamic history learning model (PSI-BK) as a deterrent power of radicalism in Higher Education to be followed up with expert validation tests and trials in subsequent studies on a broader scope.

Keywords: Curriculum, PSI-BK Model, Radicalism, Higher Education



I. PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan. Kurikulum merupakan bidang yang paling langsung berpengaruh terhadap hasil pendidikan. (Sukmadinata, 2012: 158 dalam Muhammedi, 2016:49-50). Kurikulum sangat menentukan proses dan hasil suatu sistem pendidikan. Kurikulum juga bisa berfungsi sebagai media untuk mencapai tujuan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan semua tingkat pendidikan (Arifin, 2011: 25). Benar apa yang di ungkapkan Hasan, S.H. (2012:8). Bahwa posisi kurikulum dalam kegiatan pendidikan adalah "*the heart of education*" yang berguna membangun karakter bangsa.

Lahirnya orang-orang besar dengan pemikiran besar merupakan hasil produk dari kurikulum, Karenanya benar dan terbukti apa yang dijelaskan Prof. Dr. Mestika Zed,MA, bahwa hingga saat ini produk kurikulum dipertanyakan? Tidak banyak tokoh bangsa saat ini yang memiliki reputasi dengan segudang predikat seperti HAMKA atau Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amarullah (1908-1981). Azra, dalam *Kata Pengantar* buku ini mencatat tujuh macam predikat Hamka: ulama, aktivis, politisi, jurnalis, editor dan sastrawan, di samping tokoh pemikir pendidikan. Tentu masih mungkin menambahkan sejumlah identitas lain, seperti "intelektual muslim", istilah penulis buku ini, atau mungkin sebagai "penulis" dan sebagai "sejarawan" dan seterusnya (Zed, 2011:211). Yang merupakan hasil produk kurikulum ala surau.

Minat dan reputasinya dalam berbagai bidang itu merupakan jembatan bagi publik untuk mengenal dirinya sebagai figur publik dan sebaliknya. Agak mirip dengan ketokohan Hamka perlu disebutkan tokoh Minang lainnya, Mohammad Yamin (1903-1962). Noer menyandingkan kedua tokoh ini dalam lintasan sejarah bangsa, tetapi dalam jalur berbeda, baik latar belakang mereka maupun kiprah mereka untuk bangsa. Semua predikat yang dimiliki Hamka ada pada Yamin, kecuali keulamaannya, atau keahlian di bidang agama Islam (Noer, 1983).

Yamin lebih dikenal sebagai tokoh nasionalis "sekuler" dan sejak mudanya telah menjadi aktivis politik di lingkaran pusat kaum pergerakan di Batavia serta pernah menduduki kursi pejabat tinggi negara, sesuatu yang tidak diperankan oleh Hamka. Namun ada sisi-sisi lain yang membuat Hamka lebih dikenal publik. Ia adalah tokoh yang teguh dengan pendiriannya, *istiqamah*. Keteguhannya dengan keyakinan agama dan sikap politiknya juga tercermin dalam salah satu tulisannya berjudul *Doktrin Islam yang Menimbulkan Kemerdekaan dan Keberanian* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983). Ini juga diuji dan teruji dalam sikap hidupnya sehari-hari.

Sejalan dengan konteks di atas, kurikulum merupakan jantungnya pendidikan, kurikulum yang sehat akan melahirkan generasi yang hebat begitu pula sebaliknya kurikulum yang sakit tentu akan melahirkan generasi yang sakit pula. Dalam beberapa tahun terakhir masa-lah „pendidikan karakter“ menjadi salah satu isu „berat“ dalam pendidikan



nasional kita. Berat dalam arti bahwa ia berkenaan dengan jantung persoalan pendidikan itu sendiri dan tidak mudah melaksanakannya. Persoalan ini sebenarnya sudah menahun alias kronis.

Namun masalahnya kian mencuat ke permukaan ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berniat menginstal „pendidikan karakter“ di setiap tingkat pendidikan, mulai dari sekolah rendah sampai ke perguruan tinggi pada tahun 2011. Lalu muncul perdebatan pro-kontra, antara lain tentang definisi, isi, dan metode/strategi pendidikan karakter. Latar belakang dan konteks pentingnya memperkenalkan pendidikan karakter di lembaga pendidikan terkait erat dengan fakta bahwa lembaga pendidikan sejak tiga dekade belakangan telah gagal melahirkan insan-insan berkarakter. Sebaliknya amat banyak fakta perilaku menyimpang di dalam dan di luar lembaga pendidikan (Zed, 2012:225)

Hal ini antara lain terlihat dari maraknya kasus kekerasan di sekolah, tawuran pelajar dan mahasiswa, malahan sampai jatuhnya korban nyawa sia-sia, kontek ini perlu di jawab sebuah pertanyaan sederhana namun penuh makna ada apa dengan dunia pendidikan kita, bagaimana formula-formula yang harus dibangun dalam pengembangan kurikulum kita kedepannya? Sekeder merujuk pada sebuah ungkapan Hasan S.H. (2012:1) Pusat Kurikulum merumuskan paling tidak ada 18 nilai pendidikan karakter, yakni religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan,

cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pendidikan sejarah berperan strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Penguatan pelajaran sejarah Islam di perguruan tinggi harus menjadi bagian penting dalam proses transformasi Islam berkebhinnekaan yang dapat diterapkan mulai dari perumusan capaian pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, materi, sumber dan media, sampai dengan penilaian. Undang-undang No 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional kurikulum adalah seperangkat rencana dari pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (Pasal 1). Demikian juga untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional kurikulum disusun dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaian dengan lingkungan kebutuhan pembangunan nasional perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan (Abdullah, A, 2017:342)

Dewasa ini, makin disadari pentingnya karakter dalam upaya pengembangan sumber daya manusia suatu bangsa. Berbagai kajian dan fakta menunjukkan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki karakter kuat. Nilai-nilai karakter tersebut adalah nilai-nilai yang digali dari khasanah budaya yang selaras dengan karakteristik



masyarakat setempat (kearifan lokal) dan bukan "mencontoh" nilai-nilai bangsa lain yang belum tentu sesuai dengan karakteristik dan kepribadian bangsa tersebut. Jepang menjadi bangsa yang maju berkat keberhasilannya menginternalisasi semangat *bushido* yang digali dari semangat nenek moyangnya (kaum samurai). Korea Selatan menjadi bangsa yang disegani di kawasan Asia, bahkan di dunia berkat keberhasilannya menggali nilai-nilai luhur yang tercermin dalam China dengan semangat *confusianisme*, dan Jerman dengan *protestan ethics*-nya (Wagiran, 2012:329 dalam Aisyah, S dahn Effendi, H, 2017:1).

Zed dalam sebuah buku dengan judul "*Cara baik bung Hatta*" bukan puji-pujian untuk mengagungkan Hatta. Hatta sendiri juga tidak pernah menuntut kehormatan. Jika buku ini diberi judul Cara Baik Bung Hatta, maksudnya tidak lain ialah untuk mengenang dengan harapan menghidupkan kembali warisan Bung Hatta yang semakin ditinggalkan bangsanya yang dulu pernah diperjuangkannya. Panitia Peringatan Satu Abad Bung Hatta (1902-2002) sengaja mengangkat tema Cara Baik Bung Hatta dengan mengedepankan tiga keutamaan sikap moral Bung Hatta: santun, jujur, hamat. Agaknya tidak ada memang yang menyangsikan sosok moral Hatta yang demikian. Tema ini bukan saja relevan dengan abad besar di milenium ketiga ini, tetapi juga menggugah anak-bangsa yang kehilangan pemimpin dengan kualitas watak yang langka yang ditinggalkan Hatta di tengah-tengah generasi kerdil yang tak pernah

mampu keluar dari krisis perkepanjangan sampai hari ini.

Model pembelajaran sejarah Islam masa depan perlu dirancang guna menjawab harapan dan tantangan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Sistem pendidikan yang dibangun tersebut perlu berkesinambungan dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi sehingga ditemukan solusi kurikulum pendidikan Islam yang tepat dalam membangun islam yang berkebhinnekan dan Islam yang Rahmatan li'lamin.

Kebhinekaan merupakan karakteristik masyarakat kita dan telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa kebhinekaan ini bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dalam perjalanan sejarah masyarakat Indonesia. Jauh sebelum masyarakat barat mendengungkan wacana multikulturalisme, masyarakat Indonesia telah hidup dengan kebhinekaan meliputi suku bangsa, bahasa, adat- istiadat, agama dan sebagainya (Pi'i, 2017:1 dalam Utami & Widiadi, 2016: 106).

Pemeliharaan kebhinekaam masyarakat Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat termasuk lembaga pendidikan (sekolah). Sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kebhinekaan atau pendidikan multikulturalisme kepada siswa agar muncul kesadaran betapa pentingnya nilai-nilai kebhinekaan bagi masyarakat yang kaya keberagaman. Dengan adanya kesadaran tentang nilai-nilai



kebhinekaan maka akan memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama, dan tata nilai yang terjadi di lingkungan masyarakat (Awaru, 2016: 223).

Merujuk pada permasalahan di atas, maka diperlukan pendekatan dan model pembelajaran sejarah yang kritis dan analitis. Sekali lagi perlu ditegaskan, bahwa PSI-BK memiliki visi dan misi untuk menampilkan agama pada sisi yang lebih santun, dialogis, apresiatif terhadap pluralitas dan peduli terhadap persoalan hidup yang komunal transformatif. Karena itu, peneliti menganggap penting untuk melakukan pengembangan model PSI-BK sebagai daya tangkal radikalisme di Perguruan Tinggi. Dari asumsi dan beberapa fakta tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tentang Analisis kurikulum dalam model pembelajaran sejarah Islam berbasis kebhinnekaan (PSI-BK) sebagai daya tagkal radikalisme di Perguruan Tinggi.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan dan target yang disebutkan, dalam penelitian ini dilaksanakan penelitian pengembangan model Sugiyono, dengan langkah-langkah (1) potensi dan masalah), (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) perbaiki desain, (6) perbaiki desain, (7) revisi produk, (8) uji coba produk, (9) revisi produk, (10) pembuatan produk masal (Sugiyono, 2016). Dalam menganalisis karakteristik mahasiswa di lakukan wawancara mendalam dengan para dosen, mahasiswa,

praktisi pendidikan, ormas Islam dan pemangku kepentingan lainnya guna untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah. Awal penelitian sebelumnya telah dipersiapkan dengan lengkap, baik perangkat maupun instrumen yang diperlukan dalam menunjang penelitian. Subjek dan lokasi penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan sejarah di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dan mahasiswa Prodi PPKn dan PGSD di Universitas Bung Hatta Padang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat di era globalisasi ini membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan manusia termasuk di dunia kerja. Perubahan ini menuntut kompetensi yang tinggi dan relevan untuk hidup secara layak. kebutuhan/tuntutan masyarakat tersebut menuntut pengembangan kurikulum, termasuk di Perguruan Tinggi. Dasar pengembangan kurikulum adalah diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.



Untuk memenuhi tuntutan tersebut, mau tidak mau kurikulum harus dimutakhirkan. Tanpa adanya pemutakhiran tersebut, lulusan yang dihasilkan oleh suatu institusi pendidikan menjadi ketinggalan jaman atau tidak relevan dengan perkembangan tuntutan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum tidak bisa ditawar-tawar. Berdasarkan konteks diatas dapat diperoleh gambaran data hasil monitoring dan evaluasi kurikulum dirata-ratakan dan dikonversi menurut kriteria penilaian. Kriteria penilaian menggunakan skala 4 (1-4) pada Prodi Pendidikan Sejarah IPTS dan Prodi Pendidikan PPKn dan PGSD Universitas Bung Hatta dari tabel 1 dan 2 berikut ini:

Tabel 1. Range hasil penilaian dan monitoring evaluasi kurikulum Prodi Pendidikan Sejarah IPTS

Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi	
2	Terdapat dokumen yang disusun oleh program studi mencakup kebijakan, peraturan dan pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum secara berkala
3	Terdapat panduan penyusunan dan pengembangan kurikulum yang disusun program studi, namun hanya sebagian ketentuan dalam yang dapat memfasilitasi program studi untuk melakukan penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran Kurikulum
2	Kurikulum sudah baik, hanya tinggal menyesuaikan dengan beberapa aspek teknis sesuai panduan penyusunan kurikulum
1	Kurikulum sangat baik, sudah memenuhi ketentuan

	sebagaimana dalam Panduan Penyusunan Kurikulum
Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi, profil lulusan serta kebijakan institusi dan program studi	
2	Kurikulum telah mengacu pada visi, misi, profil lulusan dan kebijakan institusi dan program studi
3	Kurikulum telah mengacu pada visi, misi dan kebijakan institusi dan program studi
2	Kurikulum hanya sebagian mengacu pada visi dan misi kebijakan institusi dan program studi saja
1	Kurikulum hanya mengacu pada kebijakan program studi saja
Pelibatan stakeholder (alumni, pengguna lulusan, pengambil kebijakan dan ahli kurikulum) dalam penyusunan kurikulum	
3	Kurikulum program studi disusun dengan mempertimbangkan masukan (1) alumni,, (2) pengguna lulusan, (3) pengambil kebijakan, (4) ahli kurikulum
2	Kurikulum program studi disusun dengan mempertimbangkan masukan (1) alumni, (2) penggunaan lulusan, (3) pengambil kebijakan
2	Kurikulum program studi disusun dengan mempertimbangkan masukan (1) alumni, (2) pengguna lulusan melalui <i>tracer study</i>
1	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh dosen program studi
Kejelasan capaian pembelajaran lulusan, yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan sesuai dengan standar KKNI	
3	Capaian pembelajaran lulusan telah memenuhi standar kompetensi lulusan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lapangan pekerjaan serta sesuai dengan standar dan deskripsi KKNI
3	Capaian pembelajaran lulusan telah memenuhi standar kompetensi lulusan dan sesuai dengan deskripsi KKNI



2	Capaian pembelajarn lulusan sesuai dengan deskripsi KKNI namun tidak memenuhi standar kompetensi lulusan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lapangan kerja
1	Capaian pembelajaran lulusan hanya memenuhi struktur mata kuliah program studi
Ketepatan metode dan strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran	
2	Penggunaan metode dan strategi pembelajaran telah menerapkan metode/model pembelajaran secara kolaboratif yang berpusat pada aktivitas mahasiswa dengan penggunaan media yang sesuai karakteristik isi capaian pembelajaran
3	Penggunaan metode dan strategi pembelajaran telah menerapkan metode/model pembelajaran secara kolaboratif yang berpusat pada aktivitas mahasiswa, namun belum sesuai karakteristik isi capaian pembelajaran
2	Penggunaan metode pembelajaran telah menerapkan metode ceramah dan diskusi serta menggunakan media penunjang yang sesuai dengan karakteristkik isi materi Pembelajaran
1	Penggunaan metode pembelajaran menerapkan metode ceramah dan diskusi saja
Ketepatan sistem penilaian dalam mengukur pencapaian capaian pembelajaran	
3	instrumen penilaian yang dapat mengukur tingkat partisipasi untuk kerja dan luaran kompetensi capaian pembelajaran mata kuliah
2	Sistem penilaian keberhasilan pembelajaran telah menerapkan teknik dan instrumen penilaian yang dapat mengukur partisipasi tingkat unjuk kerja melalui UTS dan UAS
3	Sistem penilaian keberhasilan pembelajaran menerapkan

	instrumen penilaian untuk mengukur tingkat partisipasi dalam pembelajaran
1	Sistem penilaian keberhasilan pembelajaran hanya berdasarkan tugas mahasiswa

Tabel 2. Range hasil penilaian dan monitoring evaluasi kurikulum Prodi Pendidikan PPKn & PGSD Universitas Bung Hatta

Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi

4	Terdapat dokumen yang disusun oleh program studi mencakup kebijakan, peraturan dan pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum secara berkala
3	Terdapat panduan penyusunan dan pengembangan kurikulum yang disusun program studi, namun hanya sebagian ketentuan dalam yang dapat memfasilitasi program studi untuk melakukan penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran Kurikulum
2	Kurikulum sudah baik, hanya tinggal menyesuaikan dengan beberapa aspek teknis sesuai panduan penyusunan kurikulum
1	Kurikulum sangat baik, sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Panduan Penyusunan Kurikulum
Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi, profil lulusan serta kebijakan institusi dan program studi	
4	Kurikulum telah mengacu pada visi, misi, profil lulusan dan kebijakan institusi dan program studi
3	Kurikulum telah mengacu pada visi, misi dan kebijakan institusi dan program studi
2	Kurikulum hanya sebagian mengacu pada visi dan misi kebijakan institusi dan program studi saja



1	Kurikulum hanya mengacu pada kebijakan program studi saja	secara kolaboratif yang berpusat pada aktivitas mahasiswa dengan penggunaan media yang sesuai karakteristik isi capaian pembelajaran
Pelibatan stakeholder (alumni, pengguna lulusan, pengambil kebijakan dan ahli kurikulum) dalam penyusunan kurikulum		
4	Kurikulum program studi disusun dengan mempertimbangkan masukan (1) alumni,, (2) pengguna lulusan, (3) pengambil kebijakan, (4) ahli kurikulum	3 Penggunaan metode dan strategi pembelajaran telah menerapkan metode/model pembelajaran secara kolaboratif yang berpusat pada aktivitas mahasiswa, namun belum sesuai karakteristik isi capaian pembelajaran
3	Kurikulum program studi disusun dengan mempertimbangkan masukan (1) alumni, (2) penggunaan lulusan, (3) pengambil kebijakan	2 Penggunaan metode pembelajaran telah menerapkan metode ceramah dan diskusi serta menggunakan media penunjang yang sesuai dengan karakteristik isi materi pembelajaran
2	Kurikulum program studi disusun dengan mempertimbangkan masukan (1) alumni, (2) pengguna lulusan melalui <i>tracer study</i>	1 Penggunaan metode pembelajaran menerapkan metode ceramah dan diskusi saja
1	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh dosen program studi	Ketepatan sistem penilaian dalam mengukur pencapaian capaian pembelajaran
Kejelasan capaian pembelajaran lulusan, yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan sesuai dengan standar KKNI		
4	Capaian pembelajaran lulusan telah memenuhi standar kompetensi lulusan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lapangan pekerjaan serta sesuai dengan standar dan deskripsi KKNI	4 instrumen penilaian yang dapat mengukur tingkat partisipasi untuk kerja dan luaran kompetensi capaian pembelajaran mata kuliah
3	Capaian pembelajaran lulusan telah memenuhi standar kompetensi lulusan dan sesuai dengan deskripsi KKNI	3 Sistem penilaian keberhasilan pembelajaran telah menerapkan teknik dan instrumen penilaian yang dapat mengukur partisipasi tingkat unjuk kerja melalui UTS dan UAS
2	Capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan deskripsi KKNI namun tidak memenuhi standar kompetensi lulusan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lapangan kerja	2 Sistem penilaian keberhasilan pembelajaran menerapkan instrumen penilaian untuk mengukur tingkat partisipasi dalam pembelajaran
1	Capaian pembelajaran lulusan hanya memenuhi struktur mata kuliah program Studi	1 Sistem penilaian keberhasilan pembelajaran hanya berdasarkan tugas mahasiswa
Ketepatan metode dan strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran		
4	Penggunaan metode dan strategi pembelajaran telah menerapkan metode/model pembelajaran	

Berdasarkan hasil analisis tabel 1 dan tabel 2 di atas, hasil evaluasi dan monitoring kurikulum pada Program studi Pendidikan Sejarah IPTS dan Program Studi PPKn dan UBH diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, kejelasan



dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi pendidikan Sejarah IPTS terdapat panduan penyusunan dan pengembangan kurikulum yang disusun program studi, namun hanya sebagian ketentuan dalam yang dapat memfasilitasi program studi untuk melakukan penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum berada pada skala rata-rata 3. Sementara itu kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi Prodi PPKn dan PDSG UBH terdapat dokumen yang disusun oleh program studi mencakup kebijakan, peraturan dan pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum secara berkala rata-rata 4 .

Kedua, dilihat dari Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi, profil lulusan serta kebijakan institusi dan program studi Pendidikan Sejarah. Kurikulum telah mengacu pada visi, misi dan kebijakan institusi dan program studi berada pada skala 3, sedangkan Pada Pada Prodi PPKn dan PGSD berada pada skala

Ketiga dilihat dari Pelibatan *stakeholder* (alumni, pengguna lulusan, pengambil kebijakan dan ahli kurikulum) dalam penyusunan kurikulum prodi pendidikan sejarah IPTS mendapat penilaian 2 yakni Kurikulum program studi disusun dengan mempertimbangkan masukan (1) alumni, (2) pengguna lulusan melalui *tracer study*. Sedangkan prodi PPKn dan PGSD mendapat penilaian 4 yakni Kurikulum program studi disusun dengan

mempertimbangkan masukan (1) alumni,, (2) pengguna lulusan, (3) pengambil kebijakan, (4) ahli kurikulum. **Keempat**, kejelasan capaian pembelajaran lulusan, yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan sesuai dengan standar KKNi prodi pendidikan sejarah IPTS mendapat penilaian 2 yakni Capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan deskripsi KKNi namun tidak memenuhi standar kompetensi lulusan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lapangan kerja. Sedangkan prodi PPKn dan PGSD mendapat penilaian 3 yakni capaian pembelajaran lulusan telah memenuhi standar kompetensi lulusan dan sesuai dengan deskripsi KKNi.

Kelima, Ketepatan metode dan strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran, prodi pendidikan sejarah IPTS mendapat penilaian 2 yakni Penggunaan metode pembelajaran telah menerapkan metode ceramah dan diskusi serta menggunakan media penunjang yang sesuai dengan karakteristik isi materi pembelajaran, Sedangkan prodi PPKn dan PGSD mendapat penilaian 3 yakni penggunaan metode dan strategi pembelajaran telah menerapkan metode/model pembelajaran secara kolaboratif yang berpusat pada aktivitas mahasiswa, namun belum sesuai karakteristik isi capaian pembelajaran. terakhir yang **keenam**, ketepatan sistem penilaian dalam mengukur pencapaian capaian pembelajaran prodi pendidikan sejarah IPTS mendapat penilaian 3 yakni Sistem penilaian keberhasilan pembelajaran telah menerapkan teknik dan instrumen penilaian yang



dapat mengukur partisipasi tingkat unjuk kerja melalui UTS dan UAS. Sedangkan prodi PPKn dan PGSD mendapat penilaian 4 yakni instrumen penilaian yang dapat mengukur tingkat partisipasi untuk kerja dan luaran kompetensi capaian pembelajaran mata kuliah.

Berangkat dari hasil analisis di atas, maka pengembangan kurikulum perlu sungguh-sungguh memerhatikan landasan sosial budaya masyarakat selain landasan filosofi, epistemologi, psikologi, dan pedagogi. Faktor sosial budaya penting untuk merealisasikan pendidikan sebagai sarana penerus nilai-nilai dalam masyarakat yang tidak lepas dari kenyataan sosial dan budayanya. Kurikulum harus disusun berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat meliputi nilai, adat, cita-cita, dan semua dimensi kebudayaan yang ada (Oemar Hamalik, 2011:103).

Pengembangan kurikulum di Indonesia perlu memerhatikan situasi multikultural bangsa. Masdar Hilmy dalam Choirul Mahfud (2011:78-79) berpandangan bahwa keragaman budaya bagi bangsa Indonesia merupakan kenyataan sosial yang sayangnya tidak dibarengi penerimaan positif.

Abad 21 merupakan era globalisasi yang menawarkan peluang dan tantangan. Bagi bangsa Indonesia, momentum globalisasi ini menuntut tersedianya sumber daya manusia (SDM) bermutu dan profesional. Pada dasarnya pendidikan dikembangkan untuk mempersiapkan generasi muda bangsa Indonesia menjadi warganegara yang aktif dan produktif dalam mengembangkan kehidupan

individu dirinya, masyarakat, dan bangsanya. (Hasan, S.H, 2019:61).

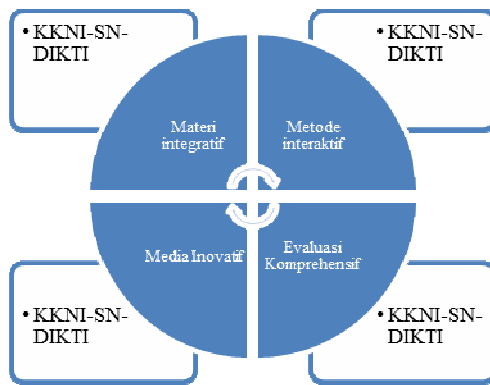
Dalam kehidupan Abad ke-21 penuh dengan perubahan dari kehidupan sebelumnya dalam dimensi yang lebih luas dan skala yang lebih tinggi karena inovasi dalam berpikir dan teknologi yang juga lebih beragam dan berderajat tinggi. Meski pun demikian, pendidikan dan terutama pendidikan sejarah tetap memberi perhatian utama kepada pengembangan kualitas manusia yang berpikir menghasilkan dan menggunakan teknologi. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, Hasan (2018a) merumuskan bahwa pendidikan berkenaan dengan kualitas manusia dalam *students in thinking, viewing, behaving using those inventions in the Fourth Technology Revolution era* (Gleason, 2018:156; Penprase, 2018: 220 – 221 dalam Hasan, 2019:64).

Oleh karena itu pendidikan sejarah dikembangkan dalam kehidupan penuh perubahan dengan tujuan *to prepare students with ways of viewing, behaving, thinking, communicating, collaborating and other skills necessary to develop a future better quality of life*. Mengutip hasil pemikiran Muhammedi mengenai kurikulum pendidikan Islam yang idel. (2016: 61). sebagai berikut: (1) menggunakan strategi kurikulum yang tepat (3) menggunakan muatan IPTEK Sesuai dengan tantangan zaman, (3) muatan materi IMTAQ berorientasi ajaran nabi yaitu Kurikulum kenabian tidak saja mampu membangkitkan jiwa, tetapi juga berhasil melahirkan para intelektual, cendekiawan, ulama, mujaddid yang sangat membanggakan. Maka diperlukan transformasi dan rekonstruksi kurikulum secara jelas terukur dan berkesinambungan.

Maka berdasarkan hasil analisis responden mahasiswa dan dosen baik



di Prodi Pendidikan sejarah IPTS maupun di Prodi PPKn Universitas Bung Hatta , maka dalam kurikulum dalam model Pembelajaran Sejarah Islam Berbasis Kebhinnekaan (PSI-BK) sebagai Daya Tangkal Radikalisme di Perguruan Tinggi perlu dikembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi dapat digambarkan melalui skema berikut ini:



Gambar 1. Skema Model PSI-BK dalam KKNi

Berdasarkan skema diatas, penting kiranya dijelaskan kembali, prinsip dasar model PSI-BK merupakan satu napas dengan prinsip KKNi-SN-DIKTI yakni mencetak generasi Indonesia yang handal menjadi pelaku pembangunan maupun pembaharu dalam tatanan masyarakat yang memiliki wawasan imtaq dan iptek yang tinggi sesuai format Tridarma Perguruan Tinggi mewujutkan Islam yang berkebhinnekan dalam bingkai keindonesian. Untuk mewujutkan tujuan tersebut maka disusunlah (1) materi pembelajaran yang integratif, (2) metode interaktif, (3) media inovatif, (4) evaluasi komprehensif. Untuk melihat lebih dalam akan diuraikan melalui langkah-langkah praktis dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Langkah-langkah praktis internalisasi model PSI-BK

N	Kera	Aspek	Kegiatan PBM
o	kteris	Holistik	
	tik		
	Mode		

I PSI-BK			
1	Materi Integratif	kerakteristik	Kabolarasi nilai-nilai islam dengan nilai-nilai kebhinnekaan, pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal, pemikiran tokoh, watak dan kepribadian
		Prinsip	Membangun kebhinnekaan dtengah perbedaan
		Dampak	Melahirkan generasi yang relijius, kreatif, empati, disiplin dan tanggung jawab
		Bagaimana mengorganisir	Kurikulum terpadu, pembelajaran <i>integrated</i> .
		Bagaimana mengajarkan	Sesuai dengan kemampuan peserta didik, pengajaran yang bervariasi, pemodelan, studi kasus, latihan dan kuis
2	Metode Interaktif	Tujuan	Menghidupkan emosi belajar siswa, kesadaran sejarah
		kerakteristik	Mengorganisasikan mahasiswa secara kelompok, membimbing kelompok,, presentase kelompok, menarik kesimpulan
		Apa yang harus diajarkan	<i>Scaffolding</i> (belajar untuk memecahan masalah), <i>Top Down</i> (siswa mulai dengan



			masalah kompleks untuk dipecahkan dan kemudian siswa memecahkan atau menemukan (dengan bimbingan guru) belajar kooperatif				
		Bagaimana mengorganisir	Memberikan masalah, memecahkan masalah, mencari, menemukan dan membuktikan, mempresentasikan secara individu atau kelompok				<i>Problem solving</i> Bagaimana mengorganisir Pengintergrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam media pembelajaran, pemanfaatan barang-barang bekas menjadi media animasi seperti candi, prasasti, mesjid, pahlawan yang di rekonstruksi secara berkelompok
		Bagaimana mengajarkannya	Pengorganisasian mahasiswa untuk berbagi inspirasi, pengorganisasian mahasiswa secara heterogen, refleksi-diskusi, kuis dan latihan sederhana penuh makna				Bagaimana mengajarkannya menggunakan media yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, bersifat visual-auditori memproyeksikan sesuatu yang dapat dilihat dan didengar. Contoh dari media ini adalah film, video, web interaktif, slide, dan sebagainya
3	Media Inovatif	Karakteristik	memiliki nilai kebaruan serta melahirkan kreativitas mahasiswa		4	Evaluasi Komprehensif	Prinsip Otentik, jelas, terukur, tidak pilih kasih, karakteristik mencakup penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan yang di dukung oleh assesmen penilaian
		Prinsip	Keteladanan, bertanggung jawab, mampu berkabolarasi				Dampak Melahirkan mahasiswa yang memiliki sikap toleransi yang baik, keterampilan berkabolarasi, komunikasi yang santun dan pemahaman yang baik terhadap materi
		Apa yang harus diajarkan	Keterampilan 4C (<i>Communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creativity and innovation</i>) (Hasan, 2019:65) <i>Critical Thinking, Creativity Collaboration, Communication Management of Feelings,</i>				Bagaimana mengorganisir Mengamati, mendorong, membimbing dan



	mengarahkan
Bagaimana mengukur	Aktivitas aktif mahasiswa, kehadiran, tugas, UTS, UAS, berdasarkan Rukblik penilaian

IV. KESIMPULAN

Kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan. Kurikulum merupakan bidang yang paling langsung berpengaruh terhadap hasil pendidikan. Posisi kurikulum dalam kegiatan pendidikan adalah "*the heart of education*" yang berguna membangun karakter bangsa.

Prinsip dasar yang di bangun dalam model PSI-BK merupakan sejalan dengan napas KKKNI-SN-DIKTI yakni mencetak generasi (mahasiswa) Indonesia yang handal menjadi pelaku pembangunan maupun pembaharu dalam tatanan masyarakat yang memiliki wawasan IMTAQ dan IPTEK yang tinggi sesuai format Tridarma Perguruan Tinggi mewujudkan Islam yang

berkebhinnekan dalam bingkai keindonesian. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka disusunlah (1) materi pembelajaran yang integratif, (2) metode interaktif, (3) media inovatif, (4) evaluasi komprehensif. Oleh karena itu pendidikan sejarah dikembangkan dalam kehidupan penuh perubahan dengan tujuan *to prepare students with ways of viewing, behaving, thinking, communicating, collaborating and other skills necessary to develop a future better quality of life.*

Hasil *need assesment* mengungkapkan responden setuju perlunya pengembangan model pembelajaran sejarah Islam berbasis kebhinnekaan (PSI-BK) sebagai daya tangkal radikalisme di Perguruan Tinggi untuk ditindaklanjuti dengan uji validasi ahli dan uji coba dalam penelitian berikutnya pada lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2007). *Kurikulum Pendidikan di Indonesia Sepanjang Sejarah Suatu Tinjauan Kritis Filosofis*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No 066 Tahun ke-13 mei 2007.
- Aisyah, S dan Effendi, H. (2017). *Revitalisasi Fungsi Tradisi Marpege-Pege Masyarakat Benteng Huraba Tapanuli Selatan Pada Era Globalisasi*. Prosiding Seminar Nasinaonal Ilmu Administrasi Negara FIS UNP.
- Arifin, Zainal. 2011. *Konsep & Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Awaru, A.O.T. 2016. *Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Berbasis Multikultural di Sekolah*, dalam Seminar Nasional "Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial



- Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”, Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, Grand Clarion Hotel, Makasar, 29 Oktober 2016.
- Effendi, Heri. Adiak, Mhd N. Aisyah, S. (2018). *Kontekstualisasi Fungsi Bagas Godang dan Sopo Godang Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Lokal*. DIAKRONIKA Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan. Vol. 18 No. 2 Th. 2018. <http://diakronika.ppj.unp.ac.id/index.php/diakronika/article/view/66/42>.
- Hasan,Said, H. (2019). Pendidikan Sejarah Untuk Kehidupan Abad ke 21. HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, Vol. II, No. 2 (April 2019). <http://ejournal.upi.edu/index.php/historia/article/view/16630>
- _____. (2012). *Pendidikan Sejarah Untuk Memperekuat Pendidikan Karakter*. Paramita Vol. 22, No. 1 - Januari 2012: 1-130. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/1875/2014>.
- _____. (2012). *Cara Baik Bung Hatta*. Padang UNP Press.
- Mumahhmedi. (2016). *Perubahan kurikulum di Indonesia Studi Kritis tentang Upaya Menemukan Kurikulum Pendidikan Islam yang ideal*. RAUDHAH: Vol. IV, No. 1: Januari – Juni 2016, ISSN: 2338 – 2163. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhah (STIT.AR) Jl. T.A Hamzah Psr. 4 Cina Gg. Melati.
- Deliar Noer, “*Yamin dan Hamka. Dua Jalan Menuju Identitas Negara*”, dalam Anthony Reid dan David Marr (eds.) *Dari Raja Ali Haji hingga Hamka*, terjemahan (Jakarta: Grafiti Pers, 1983).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan r&d. edisi ke-24*. Alfabeta, Bandung.
- Tandam Hulu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
- Pi'i. (2017). Penanaman Nilai-Nilai Kebhinnekaan dalam Pembelajaran Sejarah di SMA. SEJARAH DAN BUDAYA, Tahun Kesebelas, Nomor 2, Desember 2017 [tersedia]
- Zed, Mestika. (2012). *Memintal Masalah Pendidikan Karakter. Resensi Buku: Pendidikan Karakter Utuh dan Menyehuruh*. Jurnal Tingkap Vol 8, No 2 (2012).
- _____. (2011). *Warisan Hamka dalam Pendidikan Islam Indonesia. Resensi Buku: Warisan Hamka dalam Pendidikan Islam Indonesia*. TINGKAP Vol. VII No. 2 Th. 2011
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-undang No 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan.
- Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
- Wawancara dengan Dosen Pendidikan Sejarah Institut Pendidikan Tapanuli Seltan Januari 2019.
- Wawancara dengan Dosen Pendidikan kewarganegaraan dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bung Hatta Padang Februari 2019.
- Wawancara dengan mahasiswa Pendidikan Sejarah Institut Pendidikan Tapanuli Seltan Januari 2019